

10-2-2019

Dana Analisis Dampak Kebijakan Keuangan Pemerintah terhadap Pihak Ketiga Bank Swasta

Setiawan Wijono

Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, setiawanwijono@yahoo.com

Eugenia Mardanugraha

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke>



Part of the [Economics Commons](#), [Public Affairs](#), [Public Policy](#) and [Public Administration Commons](#), and the [Urban Studies and Planning Commons](#)

Recommended Citation

Wijono, Setiawan and Mardanugraha, Eugenia (2019) "Dana Analisis Dampak Kebijakan Keuangan Pemerintah terhadap Pihak Ketiga Bank Swasta," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*: Vol. 14: Iss. 2, Article 12.

DOI: 10.21002/jke.2019.10

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol14/iss2/12>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Kebijakan Ekonomi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Dana Analisis Dampak Kebijakan Keuangan Pemerintah terhadap Pihak Ketiga Bank Swasta

Setiawan Wijono^{a*}, & Eugenia Mardanugraha^b

^aMagister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Indonesia

^bLembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

setiawanwijono@yahoo.com

Abstract

The ability of Indonesia's private banks to muster funds vary from one province to another. The test result from 33 provinces in Indonesia during 2011-2015 show that the ratio of GDP against BUDGETS, the private bank's delivery channel ratio, and population density have a significant influence on the market share of private banks. When exclude DKI, the ratio of trade and services sector in regional GDP to bank deposits and the ratio of civil servants to the working population also have a significant effect. The ratio of APBD to GRDP gives a negative influence, while other variables contribute positively. Zoning policy forcing private banks to expand also networks in zone 5 and zone 6 which have not been great its potential. To provide incentives to private banks, the government need relaxes a few rules related to the exclusivity of state-owned banks. On the other hand private banks can focus on other variables that contribute positively to obtain optimal performance.

Keywords: APBD, Regional GDP, private bank, BI zonation, OJK

Abstrak

Kemampuan bank swasta di Indonesia dalam menghimpun dana berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lain. Hasil pengujian data 33 provinsi di Indonesia selama 2011-2015 menunjukkan bahwa rasio APBD terhadap PDRB, komposisi jaringan kantor bank swasta, dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap market share bank swasta. Sementara di luar DKI rasio sektor dagang dan jasa dalam PDRB terhadap DPK bank serta rasio PNS terhadap penduduk bekerja juga berpengaruh signifikan. Rasio APBD terhadap PDRB memberikan pengaruh negatif, sementara variabel lainnya berkontribusi positif. Kebijakan BI dan OJK terkait zonasi, memaksa perbankan swasta membuka juga jaringan kantor di zona 5 dan zona 6 yang belum besar potensinya. Untuk memberikan insentif kepada bank swasta, pemerintah perlu merelaksasi beberapa aturan terkait eksklusifitas bank BUMN. Pada sisi lain bank swasta dapat fokus pada variabel-variabel lain yang berkontribusi positif untuk mendapatkan kinerja yang optimal

Kata kunci : APBD, PDRB, PNS, bank swasta, zonasi BI, OJK

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Karena itu, kemampuan bank menghimpun dana masyarakat sangatlah penting. Besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun juga menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut.

Bank swasta sebagai salah satu jenis bank, selain bank pemerintah, bank asing, dan bank

campuran; memiliki tantangan tersendiri dalam menghimpun dana masyarakat. Kemampuan bank swasta ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini terlihat dari *market share* yang dimiliki oleh bank swasta berbeda pada setiap daerahnya. Pada propinsi Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara, bank swasta memiliki *market share* masing-masing sebesar 52%, 51%, dan 49%, namun pada propinsi Aceh, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah *market share* bank swasta tidak melebihi 20%.

*alamat korespondensi : setiawanwijono@yahoo.com

Kemampuan bank swasta menghimpun dana masyarakat ini dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal. Kebijakan pemerintah merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian. Sebagai lembaga keuangan yang sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara,

pemerintah dan regulator lainnya memiliki kepentingan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perbankan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah turut mempengaruhi kinerja maupun strategi perbankan dalam menjalankan operasinya.

Cukup banyak kebijakan pemerintah yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Dari kebijakan tersebut, terdapat beberapa yang mempengaruhi secara langsung strategi dan operasi perbankan, khususnya bank swasta. Bank Indonesia pada tahun 2012 mengeluarkan PBI No. 14/26/PBI/2012 yang mengatur ekspansi jaringan kantor bank. Pada tahun 2013, pemerintah memberlakukan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta menunjuk 4 (empat) bank BUMN sebagai pelaksana. Pada tahun 2009, BP MIGAS mengeluarkan surat edaran No. 067/BPK0000/2009/S7 yang mewajibkan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) membuka rekening di bank BUMN.

Selain faktor pemerintah, terdapat juga faktor lain yang diperkirakan turut mempengaruhi kinerja bank dalam menghimpun dana masyarakat.

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh dari variabel rasio APBD terhadap PDRB, rasio jaringan kantor bank swasta terhadap total jaringan kantor bank, rasio PDRB sektor perdagangan dan jasa terhadap

dana pihak ketiga bank, rasio PNS terhadap total penduduk bekerja, dan kepadatan penduduk suatu daerah terhadap *market share* bank swasta. Penelitian dilakukan terhadap 33 propinsi di Indonesia selama tahun 2011 – 2015.

TINJAUAN LITERATUR

Melalui PBI No. 14/26/PBI/2012, Bank Indonesia memperkenalkan ketentuan zonasi bagi perbankan dalam mengembangkan jaringan kantor bank. PBI ini membagi propinsi di Indonesia menjadi 6 zona berdasarkan tingkat kejenuhan perbankan. Zona 1 merupakan daerah dengan tingkat kejenuhan bank tertinggi, yaitu propinsi DKI Jakarta dan luar negeri, demikian seterusnya hingga, zona 6 yang merupakan zona yang memiliki tingkat terendah dalam kepadatan jaringan perbankan.

PBI ini mengatur untuk setiap pembukaan tiga Kantor Cabang Utama (KCU) di zona 1 atau 2, wajib diikuti dengan pembukaan satu KCU di zona 5 atau 6. Demikian juga dengan Kantor Cabang Pembantu (KCP) berlaku ketentuan yang sama. Dengan ketentuan ini diharapkan terjadi pemerataan penyebaran jaringan kantor cabang yang saat ini masih terkonsentrasi di daerah-daerah dengan perekonomian besar.

PBI No. 14/26/PBI/2012 merupakan salah satu kebijakan regulator yang mempengaruhi pola ekspansi perbankan.

Beberapa studi terkait faktor yang mempengaruhi deposit pada bank cukup banyak, namun belum banyak literatur yang khusus membahas faktor pemerintah terhadap kinerja bank swasta. Luon (2016) menemukan pengaruh jaminan pemerintah

(*Wholesale Funding Gurantee Scheme*) pada biaya dana dan insentif terhadap risiko institusi *funding*, sehingga institusi keuangan mampu menekan biaya dana mereka.

Helms (1985) melakukan penelitian pada 48 negara bagian Amerika periode 1965-1979 dan menyimpulkan bahwa pajak secara signifikan memperlambat pertumbuhan ekonomi, ketika pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk *transfer payment*. Namun, berdampak positif ketika pajak tersebut digunakan untuk membiayai layanan publik.

Eriemo (2014) menguji faktor makroekonomi yang mempengaruhi deposit di bank Nigeria pada periode 1980 hingga 2010 dengan menggunakan teknik OLS. Hasil pengujian dengan menggunakan *error correction model* (ECM) menunjukkan jumlah cabang bank, investasi yang dilakukan bank, suku bunga, dan tingkat inflasi pada tahun sebelum, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan mempengaruhi deposit pada bank di Nigeria.

Aregbeyen (2011) meneliti 1750 responden pada enam kota besar di Nigeria dan menemukan faktor yang menjadi pertimbangan utama nasabah dalam memilih suatu bank mencakup keamanan dana dan ketersediaan layanan teknologi. Dan, faktor-faktor lain yang dianggap penting adalah : jumlah cabang, jarak cabang dengan rumah/tempat kerja, *transaction alert*, komunikasi yang teratur dengan nasabah, ketersediaan ATM dan konektivitas ATM dengan bank lain.

Mohan (2005) meneliti hubungan antara tabungan dan pertumbuhan ekonomi dengan

berbagai *income level* pada 25 negara selama periode 1960 hingga 2001. Penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pertumbuhan tingkat tabungan pada 13 negara. Sementara pada 2 negara ditemukan hubungan sebaliknya, yaitu pertumbuhan tingkat tabungan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Dan, pada 5 negara ditemukan hubungan yang saling mempengaruhi antara tabungan dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Masson, Bayoummi, dan Samiei (1998), mengambil data pada 21 negara maju periode 1971-1993 dan 40 negara berkembang untuk periode 1982-1993 untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan swasta (*private saving*). Pengujian dilakukan dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan perubahan posisi fiskal pemerintah memiliki dampak terhadap *national saving*, khususnya pada pengurangan pengeluaran pemerintah. Faktor demografi (*dependency ratio*) secara umum mempengaruhi tingkat tabungan swasta. Pertumbuhan ekonomi (*Gross Domestic Product* (GDP) *growth*) dan tabungan swasta memiliki korelasi yang positif, walaupun belum jelas apakah hal ini merupakan hubungan kausal atau bukan. Untuk negara berkembang, GDP per kapita secara umum menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat tabungan, namun semakin tinggi *income*, pada titik tertentu, memiliki pengaruh negatif terhadap tabungan swasta.

Sadiq, *et al* (2014) melakukan penelitian untuk menentukan determinan pemilihan bank di Malaysia dengan melakukan random sampling. Hasil penelitian menyebutkan

secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sebuah bank oleh nasabah adalah kualitas layanan, kenyamanan, biaya, staf, kemudahan proses dan jenis produk, teknologi, dan pengaruh pihak lain, namun prioritas faktor yang dominan dipengaruhi oleh latar belakang demografi nasabah, seperti : jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan atau profesi nasabah. Karyawan dan pebisnis lebih mengutamakan kualitas layanan, sementara mereka yang tidak bekerja dan pelajar menempatkan kualitas layanan pada peringkat kedua.

Kuswanto & Taufiq (2015), dalam penelitian pengaruh faktor suku bunga deposito, nilai tukar, dan inflasi terhadap permintaan deposito di Indonesia selama periode 2000-2009, menunjukkan bahwa nilai tukar tidak signifikan berpengaruh terhadap suku bunga deposito, sementara tingkat inflasi berpengaruh signifikan.

Selanjutnya suku bunga deposito berpengaruh signifikan terhadap permintaan deposito. Penelitian yang dilakukan dengan metode OLS ini konsisten dengan yang dilakukan Eriemo (2014).

Hitt dan Frei (2002) melakukan penelitian atas heterogenitas nasabah *online banking* pada 7 (tujuh) bank di Amerika dengan melakukan komparasi nasabah yang menggunakan *channel* tradisional dan *internet banking*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nasabah *online banking* memiliki karakteristik yang berbeda dengan nasabah lainnya, sehingga keberadaan *distribution channel* dari *electronic channel* tidak serta merta menggantikan jaringan kantor

konvensional. Kedua *channel* ini memiliki nasabah sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianto & Hadiwidjojo (2014) terhadap penghimpunan deposito mudharabah bank syariah di Indonesia tahun 2005-2013 menunjukkan bahwa produk domestik bruto dan jumlah kantor berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Karakter nasabah dan bank syariah yang berbeda dengan bank umum diperkirakan turut mempengaruhi keputusan penempatan nasabah di bank syariah. Penempatan dana di bank syariah tidak melulu dipengaruhi oleh motif memperoleh keuntungan, tetapi juga adanya semangat saling tolong menolong dan adanya keyakinan riba pada bank konvensional. Hasil penelitian ini konsisten dengan dengan penelitian yang dilakukan Eriemo (2014), Kuswanto (2015), dan Aregbeyen (2011)

Loayza dan Shankar (2000) melakukan penelitian untuk mengukur hubungan antara saving dan faktor yang mempengaruhinya di India. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa real *interest rate*, *income per capita*, dan komposisi agriculture dalam PDB memiliki hubungan yang positif dengan *saving*, sementara variabel *financial development*, inflasi, dan *dependency ratio* memiliki hubungan yang bersifat negatif. Qin (2003) melakukan penelitian pada *saving behaviour* di Tiong Kok menemukan bahwa *expected household savings potential* merupakan faktor utama yang mempengaruhi simpanan di bank dan dalam jangka panjang, faktor yang ikut mempengaruhi adalah *interest rate spread*. Rosvitasari (2015) menyatakan bahwa Produk

Domestik Bruto mempengaruhi pengumpulan dana deposito pada bank umum konvensional di Indonesia.

METODE

Penelitian dilakukan terhadap 33 propinsi di Indonesia selama tahun 2011-2015 dengan menggunakan data yang bersumber dari Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan dan pengaruh dari besaran anggaran pemerintah dalam bentuk APBD terhadap kemampuan bank swasta dalam menggarap dana pihak ketiga. Sebagai variabel kontrol digunakan beberapa variabel lain, yaitu : jumlah kantor cabang, komposisi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, besarnya pegawai negeri sipil, dan kepadatan penduduk.

Kemampuan bank swasta menggarap dana pihak ketiga ditunjukkan dari besarnya *market share* (MSSwasta) bank swasta pada suatu propinsi di tahun tertentu.

Besaran anggaran pemerintah ditunjukkan dari rasio APBD terhadap PDRB di suatu propinsi di tahun tertentu (APBDPDRB). Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak dalam kemampuan bank swasta menghimpun dana masyarakat, karena itu nilai rasio APBD terhadap PDRB menunjukkan besarnya peran sektor pemerintah dalam perekonomian. Semakin besar rasio ini, menunjukkan semakin besarnya pengaruh pemerintah terhadap perekonomian suatu daerah.

Kekuatan jaringan kantor cabang bank swasta ditunjukkan secara komparatif melalui

rasio jaringan bank swasta terhadap total jaringan kantor bank (KompCabSwas). Semakin besar rasio ini, menunjukkan semakin besar *channel* bank swasta yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dibandingkan dengan bank pemerintah.

Komposisi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB ditunjukkan dari rasio sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB terhadap dana pihak ketiga bank (DDANJDPK). Rasio ini menunjukkan besarnya pengaruh sektor perdagangan dan jasa terhadap dana pihak ketiga bank di suatu propinsi dalam periode tertentu.

Besarnya pegawai negeri sipil (PNS) dapat dilihat melalui rasio PNS terhadap jumlah penduduk bekerja (KompPNS). Rasio ini menggambarkan besarnya rumah tangga yang bergantung pada sektor pemerintah. Besarnya penduduk yang bekerja dalam sektor pemerintah secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pemilihan bank bagi sektor usaha pendukung lainnya.

Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah. Kondisi ini digambarkan melalui nilai kepadatan penduduk (PendLuas)

Data penelitian merupakan data yang bersifat panel. Karena itu, analisis dilakukan menggunakan *panel data analysis* dengan tiga model, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

Pemilihan model estimasi dilakukan melalui serangkaian uji statistik terhadap ketiga model tersebut. Uji Chow untuk menentukan antara *common effect* dan *fixed effect*. Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan

common effect dan *random effect*. Uji Hausman atau Uji Mundlak untuk menentukan antara *fixed effect* dan *random effect*.

Pengujian statistik lain digunakan untuk menentukan reliabilitas dari model yang dipilih. Uji statistik t, digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi (*Goodness of Fit* atau R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik. Tidak seluruh asumsi klasik digunakan untuk data panel. Regresi data panel hanya membutuhkan pengujian apakah terdapat *multicollinearity* dan *heteroscedasticity*. *Multicollinearity* terjadi ketika variabel independen yang menjadi obyek penelitian saling berkorelasi satu dengan yang lain, atau terjadi hubungan linear di antara variabel independen dengan model regresi. *Multicollinearity* bermasalah jika terdapat korelasi yang kuat. Pengujian *multicollinearity* dilakukan dengan uji *Pearson Product Moment* atau *Variance Inflating Factor*.

Heteroscedasticity digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. *Heteroscedasticity* menyebabkan uji-t dan uji-F menjadi tidak tepat. Pengujian

heteroscedasticity tidak dibutuhkan dalam model *random effect*, karena *random effect* menggunakan *generalized least square* dengan asumsi *homoscedasticity* dan tidak terjadi *cross-sectional correlation*.

HASIL

Perkembangan industri perbankan tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan otoritas lainnya. Sebelum tahun 1983, perbankan Indonesia dapat dikatakan tidak berkembang. Seluruh aspek kegiatan perbankan diatur oleh pemerintah dan BI. Statistik perbankan hampir tidak mengalami perubahan berarti karena kondisi yang *over regulated*.

Perkembangan perbankan mengalami titik balik setelah pemerintah bersama BI mengeluarkan Paket Oktober 1988, dimana persyaratan pembukaan bank dan cabang bank dipermudah. Perbankan swasta tumbuh sangat pesat. Situasi ini menyebabkan terjadinya ekspansi besar-besaran sektor keuangan yang berujung kepada krisis pada tahun 1997.

Pasca krisis tahun 1997, pemerintah dan BI fokus kepada pemulihan kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berfokus untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, BI pada tahun 2012 mengeluarkan PBI no. 14/26/PBI/2012 perihal Kegiatan Usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Tabel 1. Ringkasan Variabel Yang Diamati

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations	
MSSWasta	overall	,3084096	,1230307	,082736	,5416491	N =	165
	between		,1238150	,0950101	,5282617	n =	33
	within		,0134279	,2730805	,3464623	T =	5
APBDPDRB	overall	,0311430	,0196905	,0082464	,0970157	N =	165
	between		,0193916	,0106698	,0852832	n =	33
	within		,0045666	,0138807	,0430869	T =	5
KompCabSwas	overall	,2689595	,0902532	,1097561	,6108054	N =	165
	between		,0869541	,1182109	,5212317	n =	33
	within		,0277316	,1443879	,3948789	T =	5
DDANJDPK	overall	,6890594	,2333303	,2751833	1 ,1434340	N =	165
	between		,2325244	,2904503	1 ,0848940	n =	33
	within		,0411605	,5895284	,8372832	T =	5
KompPNS	overall	,0571518	,0257706	,0165545	,2192903	N =	165
	between		,0230403	,0196311	,1071478	n =	33
	within		,0120919	,0192955	,1841247	T =	5
PendLuas	overall	,7158457	2 ,5624160	,0081008	15 ,3279700	N =	165
	between		2 ,5939200	,0085393	15 ,0110300	n =	33
	within		,0407609	,3914933	1 ,0327830	T =	5

Analisis Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2011 – 2015. Variabel yang diuji mencakup market share bank swasta sebagai variabel dependen (MSSwasta) yang menggambarkan kemampuan bank swasta

dalam menghimpun DPK secara relatif terhadap jenis bank lainnya. Sebagai variabel independen yang utama adalah rasio APBD terhadap PDRB (APBDPDRB) untuk menilai pengaruh APBN terhadap kemampuan bank swasta dalam meraih market share-nya. Sementara itu, variabel independen yang

Tabel 2. Rata-2 Market Share Bank Swasta Per Zona BI

Provinsi	Zona	MS 2011-2015	Avg Zona	Provinsi	Zona	MS 2011-2015	Avg Zona
DKI	1	51,3%	51,3%	Aceh	5	14,9%	27,3%
Bali	2	34,2%	42,7%	Bengkulu	5	20,6%	
Banten	2	52,7%		Jambi	5	33,6%	
DIY	2	33,7%		Kalbar	5	40,2%	
Jabar	2	46,6%		Babel	5	32,5%	
Jateng	2	38,7%		Lampung	5	35,2%	
Jatim	2	50,3%		Sultara	5	18,6%	
Kaltim	3	29,3%	43,8%	Sumbar	5	22,8%	
Kepri	3	50,7%		Gorontalo	6	27,4%	19,8%
Sumut	3	51,5%		Maluku	6	30,8%	
Kalsel	4	28,4%	28,3%	Malut	6	19,4%	
Kateng	4	16,0%		NTB	6	27,0%	
Papua	4	21,2%		NTT	6	12,3%	
Riau	4	32,5%		Papua Barat	6	13,5%	
Sulsel	4	35,7%		Sulbar	6	9,5%	
Sulut	4	32,5%		Sulteng	6	18,8%	
Sumsel	4	32,0%					

berfungsi sebagai variabel kontrol adalah : komposisi jaringan kantor bank swasta terhadap total jaringan kantor cabang bank (KompCabSwas), rasio sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB terhadap dana pihak ketiga bank (DDANJDPK), komposisi pegawai negeri sipil dalam penduduk bekerja (KompPNS), dan tingkat kepadatan penduduk (PendLuas).

Secara umum, statistik dari seluruh variabel dapat dilihat pada Tabel 1. Kolom "Observations" menunjukkan ringkasan jumlah data yang diobservasi, yaitu terdapat 165 data (N) yang terbagi dari 33 provinsi (n) dan periode 5 tahun (T).

Pada kolom "Variable" terlihat variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini, dimana pada setiap variabel ditampilkan tiga jenis statistik, yaitu overall, between, dan within. Overall merupakan statistik secara umum dari keseluruhan data. Between merupakan ringkasan statistik berdasarkan

provinsi tanpa memperhitungkan periode waktu. Within merupakan ringkasan statistik berdasarkan periode waktu, tanpa memperhatikan provinsi.

Untuk *Market share* bank swasta tertinggi seperti terlihat pada Tabel 2, berada pada propinsi yang berada di zona 1 sesuai ketentuan BI. Rata-rata *market share* bank swasta pada propinsi di zona 1 sebesar 51,3%. Pada zona selanjutnya, *market share* bank swasta cenderung menurun, hingga mencapai rata-rata terendah pada propinsi yang berada di zona 6 sebesar 19,9%. Kebijakan BI yang mendorong perbankan membuka jaringan di zona 5 dan 6 sudah cukup tepat. Dengan kebijakan ini, diharapkan terjadi pemerataan penyebaran bank sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan keuangan.

Rasio APBD terhadap PDRB cenderung meningkat pada propinsi yang berada di zona 5 atau 6.

Tabel 3. Rata-2 Rasio APBD terhadap PDRB Per Zona BI

Provinsi	Zona	Avg 2011-2015	Avg Zona	Provinsi	Zona	Avg 2011-2015	Avg Zona
DKI	1	2,8%	2,8%	Aceh	5	8,2%	3,3%
Bali	2	2,5%	1,8%	Bengkulu	5	4,1%	
Banten	2	1,4%		Jambi	5	1,8%	
DIY	2	2,8%		Kalbar	5	2,7%	
Jabar	2	1,3%		Babel	5	3,0%	
Jateng	2	1,4%		Lampung	5	1,8%	
Jatim	2	1,1%		Sultara	5	2,6%	
Kaltim	3	1,9%	1,7%	Sumbar	5	2,1%	
Kepri	3	1,5%		Gorontalo	6	4,6%	4,8%
Sumut	3	1,6%		Maluku	6	5,9%	
Kalsel	4	3,3%	3,0%	Malut	6	6,1%	
Kalteng	4	3,2%		NTB	6	3,1%	
Papua	4	6,8%		NTT	6	3,8%	
Riau	4	1,1%		Papua Barat	6	8,6%	
Sulset	4	1,8%		Sulbar	6	4,1%	
Sulut	4	2,7%		Sulteng	6	2,5%	
Sumsel	4	2,0%					

Hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian di daerah-daerah yang relatif belum terlalu berkembang masih besar. Hal ini dapat dimengerti bahwa investor swasta cenderung memiliki daerah yang lebih maju dari sisi perekonomian maupun infrastruktur sebagai tempat berinvestasi, sehingga pada daerah yang

daerah memberikan kesempatan bagi bank untuk menggarap potensi yang ada, sehingga semakin besar jaringan kantor bank akan memperbesar kesempatan tersebut. Rasio bank swasta pada propinsi di zona padat cenderung tinggi, tertinggi berada pada propinsi DKI Jakarta yang berada di zona 1 sebesar 51,8%. Rasio ini semakin kecil pada

Tabel 4. Lima Provinsi Yang Memiliki Jaringan Kantor Terbanyak Tahun 2015

PROPINSI	BANK BUMN	BANK SWASTA	BANK UMUM
Jabar	2.531	1.664	4.195
Jatim	2.452	1.379	3.831
DKI	1.629	2.086	3.715
Jateng	1.941	1.058	2.999
Sumut	540	775	1.315
	9.093	6.962	16.055

relatif belum maju, dibutuhkan peran pemerintah yang lebih besar.

Jaringan kantor pada dasarnya merupakan *distribution channel* bank suatu bank dalam

zona-zona yang belum berkembang, rata-rata terendah berada pada zona 6 sebesar 20,9%; dimana pada zona 6, komposisi jaringan bank swasta terendah sebesar 13,6% berada di

Tabel 5. Rata-Rata Rasio PDRB Sektor Perdagangan Dan Jasa Terhadap DPK Perbankan Berdasarkan Zona BI

Provinsi	Zona	Avg 2011-2015	Avg Zona
DKI	1	30,9%	30,9%
Bali	2	29,0%	60,0%
DIY	2	29,4%	
Banten	2	60,7%	
Jabar	2	74,6%	
Jateng	2	80,0%	
Jatim	2	86,5%	
Kaltim	3	38,1%	48,9%
Kepri	3	44,7%	
Sumut	3	63,9%	
Kalsel	4	39,9%	64,4%
Papua	4	46,6%	
Sumsel	4	61,3%	
Sulut	4	65,8%	
Sulsel	4	73,7%	
Kalteng	4	75,8%	
Riau	4	87,3%	

Provinsi	Zona	Avg 2011-2015	Avg Zona
Babel	5	60,1%	84,7%
Kalbar	5	61,3%	
Aceh	5	84,8%	
Jambi	5	85,8%	
Sultara	5	91,6%	
Sumbar	5	96,2%	
Lampung	5	98,4%	
Bengkulu	5	99,3%	
Papua Barat	6	36,1%	75,5%
Maluku	6	50,8%	
NTT	6	55,0%	
Sulteng	6	80,4%	
Malut	6	84,2%	
NTB	6	85,7%	
Gorontalo	6	103,3%	
Sulbar	6	108,7%	

menggarap potensi pasar suatu daerah. Keberadaan satu jaringan kantor di suatu

propinsi NTT dan tertinggi sebesar 28,1% berada di propinsi Gorontalo.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa rata-rata rasio DDANJDPK cukup signifikan, yaitu sebesar 68,9% pada 33 propinsi selama periode 2011-2015. Rata-rata rasio tertinggi berada pada propinsi Sulawesi Barat, yaitu rata-rata sebesar 108,5%, sementara terendah berada di Propinsi Bali dengan rata-rata

Secara rata-rata rasio DDANJDPK di zona 2 masih mencapai 60%.

Rasio PNS terhadap penduduk bekerja per propinsi secara umum meningkat pada propinsi-propinsi yang relatif belum maju. Kekhususan terjadi pada propinsi DKI Jakarta yang berada di Zona1, dimana rasio KompPNS

Tabel 6. Rata-Rata Rasio PNS Terhadap Penduduk Bekerja Berdasarkan Zona BI

Provinsi	Zona	Avg 2011-2015	Avg Zona	Provinsi	Zona	Avg 2011-2015	Avg Zona
DKI	1	9,2	9,2	Lampung	5	3,5	6,0
Banten	2	2,0	2,9	Kalbar	5	4,2	
Jabar	2	2,3		Jambi	5	5,4	
Jatim	2	2,5		Babel	5	5,1	
Jateng	2	2,7		Sumbar	5	6,3	
DIY	2	4,2		Bengkulu	5	7,1	
Bali	2	4,0		Sultara	5	7,9	
Kepri	3	4,1	4,6	Aceh	5	8,4	
Sumut	3	4,0		NTB	6	4,4	7,6
Kaltim	3	5,8		NTT	6	5,7	
Sumsel	4	3,8	5,5	Sulbar	6	5,8	
Riau	4	4,1		Sulteng	6	6,8	
Kalsel	4	5,0		Gorontalo	6	7,3	
Sulsel	4	5,7		Malut	6	9,4	
Papua	4	5,9		Maluku	6	10,5	
Kalteng	4	6,7		Papua Barat	6	10,7	
Sulut	4	7,7					

sebesar 29%.

Ditinjau dari sisi zonasi perbankan yang ditetapkan oleh BI, rasio ini bervariasi antara propinsi satu dengan yang lainnya, namun memiliki kecenderungan membesar pada propinsi yang belum terlalu berkembang, yaitu propinsi yang berada pada zona 5 dan 6. Secara rata-rata per zona, propinsi pada zona 1, yaitu DKI Jakarta memiliki angka terkecil, yaitu sebesar 30,9%. Walaupun beberapa propinsi di zona 2 memiliki rasio yang kecil, yaitu Bali sebesar 29% dan DIY sebesar 29,4%, namun secara umum propinsi di zona 2 memiliki rasio DDANJDPK yang cukup tinggi.

sebesar 9,2%. Hal ini disebabkan karena status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sehingga banyak staf departemen dan lembaga nasional lainnya yang berkedudukan di Jakarta. Namun, jika kita melihat zona yang tidak terpengaruh hal tersebut, propinsi yang berada pada zona 2 yang berada di pulau Jawa dan Bali memiliki rata-rata rasio paling rendah sebesar 2,9%. Secara rata-rata rasio KompPNS ini meningkat pada propinsi di zona berikutnya dan propinsi di zona 6 sebagai daerah yang belum semaju pulau Jawa memiliki rata-rata rasio 7,6%.

Tingkat kepadatan penduduk cenderung menurun pada propinsi yang berada di zona yang belum maju. Kepadatan penduduk tertinggi berada pada propinsi DKI Jakarta yang terdapat di zona 1, sebesar 15 ribu orang/km². Kepadatan penduduk pada propinsi yang berada di zona 2 lebih rendah dengan rata-rata pada zona tersebut sebesar

MSSwa_{it} = *market share* bank swasta pada propinsi *i* tahun *t*

APBDP_{it} = rasio APBD terhadap PDRB pada propinsi *i* tahun *t*

KompC_{it} = rasio kantor bank swasta terhadap total jaringan kantor bank pada propinsi *i* tahun *t*

DDANJ_{it} = rasio PDRB sektor perdagangan dan jasa terhadap dana pihak ketiga bank umum propinsi *i* tahun *t*

KompP_{it} = rasio pegawai negeri sipil terhadap total penduduk bekerja pada propinsi *i* tahun *t*

PendLu_{it} = kepadatan penduduk pada propinsi *i* tahun *t*

i = propinsi *i*

t = tahun ke-*t*

1,02 ribu orang/km². Kepadatan pendudukan pada propinsi yang berada di zona 3 dan seterusnya cenderung semakin rendah hingga propinsi yang berada di zona 6, dimana rata-rata kepadatan pendudukan di zona 6 hanya sebesar 80 orang/km².

Analisis Regresi

Pemodelan regresi dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pengujian dilakukan untuk

menentukan model mana yang akan digunakan.

Hasil uji Chow menunjukkan hasil "Prob > F = 0,0000", sehingga dapat disimpulkan H₀ ditolak, artinya model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan *common effect*.

Hasil uji LM menunjukkan bahwa *random effect* lebih baik digunakan sebagai model estimasi dibandingkan dengan *common effect*. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji LM "Prob > chibar2 = 0,0000". Sementara hasil uji Mundlak untuk menentukan model yang lebih baik antara *random effect* dan *fixed effect* menunjukkan hasil "Prob > Chiz = 0,0000" atau < 0,05. Hasil ini menunjukkan *random effect* lebih sesuai dibandingkan dengan *fixed effect*.

Dengan digunakannya *random effect*, model persamaan yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned} MSSwasta_{it} = & \beta_{1i} + \beta_2 APBDPDRB_{it} \\ & + \beta_3 KompCabSwas_{it} \\ & + \beta_4 DDANJDPK_{it} \\ & + \beta_5 KompPNS_{it} \\ & + \beta_6 PendLuas_{it} + U_{it} \end{aligned}$$

dimana,

Uji statistik F memperlihatkan "Prob > chi2" = 0.0000", sehingga dapat disimpulkan variabel dependen secara bersama-sama pengaruh yang signifikan terhadap market share bank swasta. Sementara dari uji koefisien determinasi (R²) menunjukkan angka 0,3408 atau 34,08% yang berarti bahwa *market share* bank swasta di 33 propinsi Indonesia selama periode 2011-2015 dapat dijelaskan oleh variabel rasio APBD terhadap PDRB, rasio

jaringan cabang bank swasta terhadap total jaringan kantor bank, rasio sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB terhadap dana pihak ketiga bank, rasio jumlah pegawai negeri sipil terhadap total penduduk bekerja, dan kepadatan penduduk; sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara parsial

Uji statistik t menunjukkan, tingkat $\alpha = 0,05$ variabel independen yang signifikan berpengaruh adalah variabel APBDPDRB, KompCabSwas, PendLuas yang memiliki nilai " $P > |z|$ " masing-masing sebesar 0.000; 0.009; dan 0.002. Sementara variabel KompPNS serta DDANJDPK tidak signifikan berpengaruh pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan nilai " $P > |z|$ " masing-masing sebesar

Tabel 7. Rata-Rata Kepadatan Penduduk Berdasarkan Zona BI

Provinsi	Zona	Avg 2011-2015	Avg Zona	Provinsi	Zona	Avg 2011-2015	Avg Zona
DKI	1	15,0	15,01	Kalbar	5	0,0	0,10
Bali	2	0,7	1,02	Sultara	5	0,1	
Jatim	2	0,8		Jambi	5	0,1	
Jateng	2	1,0		Babel	5	0,1	
DIY	2	1,1		Aceh	5	0,1	
Banten	2	1,2		Bengkulu	5	0,1	
Jabar	2	1,3		Sumbar	5	0,1	
Kaltim	3	0,0	0,15	Lampung	5	0,2	
Sumut	3	0,2		Papua Barat	6	0,0	0,08
Kepri	3	0,2		Maluku	6	0,0	
Papua	4	0,0	0,09	Malut	6	0,0	
Kalteng	4	0,0		Sulteng	6	0,0	
Riau	4	0,1		Sulbar	6	0,1	
Sumsel	4	0,1		Gorontalo	6	0,1	
Kalsel	4	0,1		NTT	6	0,1	
Sulut	4	0,2		NTB	6	0,3	
Sulsel	4	0,2					

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan data memperlihatkan koefisien dari masing-masing variabel independen, sehingga persamaan hasil regresi yang ditulis menghasilkan persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 MSSwasta_{it} = & 0,2588 \\
 & - 0,9204.APBDPDRB_{it} \\
 & + 0,1155.KompCabSwas_{it} \\
 & + 0,0494.DDANJDPK_{it} \\
 & + 0,0002.KompPNS_{it} \\
 & + 0,0169.PendLuas_{it}
 \end{aligned}$$

0.872 dan 0.073.

Uji *multicollinearity* yang dilakukan dengan melihat nilai *variance inflating factor* (VIF) menunjukkan hasil secara keseluruhan < 10 , sehingga H_0 tidak ditolak artinya tidak terjadi masalah *multicollinearity* antar variabel.

Uji menggunakan *Pearson Product Moment* menghasilkan nilai korelasi antar variabel $< 0,75$. Dengan demikian asumsi H_0 tidak ditolak, artinya secara keseluruhan model tidak terjadi masalah *multicollinearity* yang kuat.

Pengujian dengan mengeluarkan data provinsi DKI memperlihatkan bahwa rasio

PNS dan rasio APBD (sektor dagang dan jasa) juga berpengaruh signifikan terhadap *market share* bank swasta.

Pembahasan

Hasil pengolahan data di 33 propinsi Indonesia selama periode 2011-2015 menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel independen yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *market share* bank swasta dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Variabel APBDPDRB, KompCabSwas dan PendLuas memiliki pengaruh signifikan, sementara variabel DDANJDPK dan KompPNS tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan secara lebih detail sebagai berikut.

Pertama, rasio APBD terhadap PDRB memiliki dampak negatif atau berbanding terbalik dengan kenaikan *market share* bank swasta (MSSwasta). Nilai koefisien sebesar 0,9204 memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 unit APBDPDRB akan menyebabkan terjadinya penurunan 0,9204 unit MSSwasta dari sisi waktu ataupun propinsi, dengan asumsi faktor lain tidak berubah.

Government spending merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai salah satu pilar pembangunan, perkembangan perbankan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perekonomian negara. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin besar peran pemerintah dalam suatu perekonomian, walaupun berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, namun memberikan pengaruh negatif bagi sektor bank non swasta.

Penelitian Masson, Bayoummi, dan Samiei (1998) yang menunjukkan adanya pengaruh posisi fiskal pemerintah terhadap *national saving* pada dasarnya sesuai dengan hasil penelitian. Besarnya pengaruh APBD terhadap PDRB turut mempengaruhi *market share* bank swasta. Hal ini dapat dipahami, karena terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap perbankan sektor swasta, seperti :

penunjukkan 4 (empat) bank BUMN sebagai partner sistem perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), penunjukkan 4 (empat) bank BUMN sebagai penyalur dana bansos secara elektronik, dan Kebijakan BPMIGAS kepada seluruh KKKS untuk melakukan seluruh transaksi pembayaran melalui bank BUMN, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan ini menyebabkan pada daerah-daerah dimana pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap PDRB, peran bank swasta cenderung lebih kecil.

Kedua, rasio komposisi jaringan kantor cabang bank swasta (KompCabSwas) memiliki pengaruh yang positif terhadap *market share* bank swasta (MSSwasta). Koefisien KompCabSwas sebesar 0.1155 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit KompCabSwas (persentase jaringan bank swasta terhadap total jaringan kantor) akan menyebabkan kenaikan 0.1155 unit MSSwasta dari sisi waktu ataupun propinsi, dengan asumsi faktor lain tidak berubah.

Jaringan kantor bank merupakan salah satu *channel* bagi perbankan dalam menggarap potensi yang ada di suatu daerah. Eriemo (2014) menyimpulkan bahwa jumlah bank memiliki pengaruh yang positif terhadap deposit di bank, demikian juga dengan

Aregbeyen (2011) yang menemukan bahwa jumlah bank mempengaruhi pemilihan nasabah terhadap suatu bank. Hitt & Frei (2002) menyimpulkan bahwa keberadaan jaringan kantor konvensional tidak serta merta dapat digantikan oleh *electronic channel*. Penelitian Aregbeyen Novianto & Hadiwidjojo (2014) menyimpulkan hal serupa, dimana jumlah kantor berpengaruh signifikan dalam penghimpunan deposito di bank.

Ketiga, variabel kepadatan penduduk pada suatu propinsi (PendLuas) memiliki pengaruh yang positif terhadap *market share* bank swasta (MSSwasta). Koefisien 0.0169 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan 1 unit PendLuas akan menyebabkan kenaikan 0.0169 MSSwasta dari sisi waktu ataupun propinsi, dengan asumsi faktor lain tidak berubah.

Kepadatan penduduk merupakan pisau bermata dua, karena semakin padat suatu daerah, permasalahan sosial di daerah tersebut cenderung juga meningkat. Pada sisi lain, kepadatan penduduk suatu daerah mengindikasikan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Masyarakat cenderung mencari daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi baik, sehingga kebanyakan daerah yang memiliki perekonomian yang baik akan memiliki tingkat kepadatan yang relatif lebih tinggi di banding daerah lainnya. Kepadatan penduduk juga memudahkan perbankan dalam mengakses potensi masyarakat sekitar.

Pengujian terhadap variabel DDANJDPK menunjukkan dua skenario berbeda. Secara nasional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap MSSwasta, namun ketika data DKI dikeluarkan memiliki pengaruh signifikan.

Rasio PDRB sektor dagang dan jasa pada dasarnya memiliki pengaruh positif terhadap *market share*. Tidak berpengaruhnya rasio ini terhadap *market share* bank swasta secara nasional dapat terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, dari analisis deskriptif terlihat bahwa rasio PDRB terhadap DPK perbankan justru tinggi pada zona 5 dan zona 6, dimana jaringan kantor bank swasta tidak terlalu banyak. Sehingga, masyarakat atau pelaku bisnis di daerah tersebut akan memilih bank BUMN atau bank pembangunan daerah (BPD) yang memiliki jaringan luas di daerah sekitar. Walaupun rasio PDRB sektor perdagangan dan jasa tinggi di propinsi yang berada di zona 5 dan zona 6, namun tidak terdapat banyak pilihan bagi pelaku usaha dalam memilih jenis bank.

Kedua, walaupun sektor perdagangan dan jasa di zona 5 dan zona 6 tinggi, namun secara ukuran nilai tidak terlalu besar. Nilai PDRB di zona 1 sangat besar yaitu Rp 677,4 triliun, sementara zona 6 hanya sebesar Rp 8.1 triliun. Dapat dikatakan, rata-rata nilai PDRB per propinsi sektor perdagangan dan jasa di zona 1 adalah 84 kali besarnya PDRB sektor perdagangan dan jasa di zona 6. Dari sisi nilai PDRB yang tidak terlampau besar, kemungkinan sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB ini juga didominasi oleh sektor informal.

Dengan kondisi geografis zona 6 yang terbagi dalam berbagai kepulauan, potensi ini kurang menarik bank swasta untuk berinvestasi membuka jaringan kantor di kawasan ini.

Variabel KompPNS juga menghasilkan dua skenario berbeda. Secara nasional tidak berpengaruh signifikan, namun di luar

provinsi DKI memiliki pengaruh yang positif. Pengaruh positif ini memperlihatkan bahwa pemilihan bank tidak serta merta ditentukan oleh profesi, khususnya PNS. Dapat juga disebabkan promosi bank swasta yang cukup besar sehingga menarik masyarakat membuka rekening.

Secara nasional rasio PNS terhadap penduduk bekerja yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *market share* bank swasta, hal ini dapat disebabkan karena rasio PNS terhadap penduduk bekerja, tidak selalu berbanding lurus dengan rasio belanja pegawai dalam APBD terhadap total APBD, sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap DPK masyarakat yang dihimpun perbankan. Komunitas PNS yang memiliki rekening bank BUMN tidak serta merta memperkuat kemampuan bank BUMN mendapatkan DPK masyarakat. Kemampuan bank dalam mendapatkan dana masyarakat lebih dipengaruhi oleh besarnya dana pemerintah dan faktor lainnya.

Data yang diambil terhadap 5 (lima) propinsi dengan rasio PNS tertinggi dan 5 (lima) propinsi dengan rasio PNS terendah memperlihatkan bahwa pada propinsi yang memiliki rasio PNS tinggi, tidak selalu berdampak terhadap tingginya rasio belanja pegawai. Propinsi Papua Barat yang memiliki rasio KompPNS tertinggi, yaitu sebesar 10,7% hanya memiliki rasio belanja pegawai dalam APBD sebesar 6,1%. Propinsi Maluku yang juga memiliki rasio KompPNS tertinggi sebesar 10,5% memiliki rasio belanja pegawai terhadap APBD sebesar 24,9%.

Sementara, pada 5 (lima) propinsi yang memiliki rasio KompPNS terendah. Propinsi Banten yang memiliki rasio KompPNS

terendah sebesar 2% memiliki rasio belanja terhadap APBD sebesar 8,5%. Propinsi Lampung yang memiliki rasio KompPNS sebesar 3,5% memiliki rasio belanja pegawai sebesar 16,4%. Rasio ini jauh di atas rasio propinsi Papua Barat.

Besar kecilnya rasio PNS terhadap angkatan kerja juga dapat disebabkan dari jumlah penduduk yang berada di daerah tersebut. Propinsi Papua Barat memiliki rasio PNS yang tertinggi, namun jika ditinjau dari jumlah PNS dan penduduk bekerja, jumlahnya dapat dikatakan kecil, masing-masing hanya sebesar 38.673 jiwa dan 362.120 jiwa. Demikian juga dengan propinsi Maluku yang memiliki rasio PNS sebesar 10,5%, hanya memiliki 66.963 PNS dari total penduduk bekerja sebanyak 637.327 jiwa. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan 5 (lima) propinsi yang memiliki rasio PNS terendah. Jawa Tengah memiliki rasio PNS hanya sebesar 2,7%, namun jumlah PNS di propinsi ini sebanyak 443.198 dari total penduduk bekerja sebesar 16,4 juta jiwa. Demikian juga dengan propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang memiliki rasio PNS masing-masing sebesar 2,5% dan 2,3% memiliki jumlah PNS sebesar 483.734 dan 427.183. Sehingga walaupun rasio PNS yang kecil terhadap jumlah penduduk bekerja, namun jumlah PNS yang besar berdampak kepada besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai operasional rutin PNS.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari penelitian ini. *Pertama*, kebijakan pemerintah dan regulator seperti Bank Indonesia, secara langsung berdampak terhadap pola perkembangan bank swasta. Bank swasta

mengalami fase perkembangan yang pesat ketika pemerintah menggulirkan Pakto 88. Perbankan juga mengalami perubahan strategi pengembangan jaringan ketika BI mengeluarkan PBI No. 14/26/PBI/2012 yang mengharuskan adanya pembukaan cabang di zona 5 dan 6 sebagai kompensasi pembukaan jaringan di zona 1 dan 2.

Kedua, beberapa kebijakan pemerintah, khususnya dalam sektor keuangan, secara langsung maupun tidak, mempengaruhi kemampuan bank swasta dalam menghimpun dana masyarakat. Beberapa kebijakan yang mengharuskan penggunaan bank BUMN, seperti SPAN, bantuan KKS, dan transaksi migas; mengakibatkan perbankan swasta kehilangan potensi mendapatkan dana dari bidang tersebut. Pengaruh sektor pemerintah yang digambarkan dalam rasio APBD terhadap PDRB bersifat negatif dengan koefisien penurunan *market share* bank swasta sebesar 0,9204 untuk setiap penambahan rasio sebesar 1%.

Ketiga, selain sektor pemerintah, faktor lain yang berkontribusi positif bank swasta dalam menghimpun dana masyarakat adalah rasio jaringan kantor cabang (0,1155) dan kepadatan penduduk (0,0169). Faktor lain yang ikut diteliti, yaitu rasio PDRB sektor perdagangan dan jasa terhadap DPK dan rasio PNS terhadap penduduk bekerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *market share* bank swasta, secara nasional. Namun, berpengaruh signifikan ketika data DKI dikeluarkan.

SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak. Pemerintah, BI, atau OJK, perlu memahami bahwa kebijakan zonasi pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik, namun perlu melakukan beberapa relaksasi terhadap beberapa ketentuan eksklusivitas bank BUMN. Penunjukkan bank BUMN sebagai pelaksana SPAN, penyaluran dana bansos, bank operasional KKKS, dan lain-lain dapat melibatkan bank swasta yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini dapat menjadi insentif bagi bank untuk membuka di daerah-daerah yang belum terlalu berkembang (zona 5 dan zona 6).

Untuk lebih mengoptimalkan strategi ekspansi cabang, bank swasta dapat fokus kepada daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk memadai. Pembukaan jaringan kantor cabang berdampak positif bagi bank swasta, khususnya pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk memadai.

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel independen lain, menggunakan data daerah tingkat dua dan jangka waktu yang lebih panjang. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan 34,08% *market share* bank swasta.

Faktor lain yang dapat didalami adanya perubahan perilaku nasabah bank yang berpindah dari transaksi di jaringan konvensional ke jaringan digital pada beberapa tahun belakangan. Perubahan perilaku ini dapat mempengaruhi signifikansi dari variabel-variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aregbeyen, O. (2011). The Determinants of Bank Selection Choices by Customers: Recent and Extensive Evidence from Nigeria. *Int. J. Bus. Soc. Sci*, 2(22), 276-288..
- Bari'ah, B. A., Abidin, Z., & Nurtjahjanti, H. (2009). Hubungan antara Kualitas Layanan Bank dengan Minat Menabung Nasabah PT BRI Kantor Cabang Ungaran (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Bollard, Albert, Neel Doshi, Marukel Nunez Maxwell (2014). The Future of US Retail-Banking Distribution. <http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-future-of-us-retail-banking-distribution>. Retrieved : 30 Mei 2017
- Eriemo, N. O. (2014). Macroeconomic Determinants of Bank Deposits in Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(10), 49-57.
- Hitt, L. M., & Frei, F. X. (2002). Do better customers utilize electronic distribution channels? The case of PC banking. *Management Science*, 48(6), 732-748.
- Hsiao, Chen (2014). Analysis of Panel Data. Third Edition. Cambrige University Press. 4-10
- Investopedia. Market Share. <http://www.investopedia.com/terms/m/marketshare.asp>. Retrieved : 28 Mei 2017
- Julianto, Pramdia Arhando (2016). Pemerintah Libatkan 4 Bank BUMN Salurkan Dana Bansos Secara Elektronik. <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/18/202220226/pemerintah.libatkan.4.bank.bumn.salurkan.dana.bansos.secara.elektro.nik>. Retrieved : 20 September 2017
- KD, Herlina, Annisa Aninditya Wibawa (2012). Pemerintah Tunjuk 4 Bank Salurkan Dana APBN. <http://keuangan.kontan.co.id/news/pemerintah-tunjuk-4-bank-salurkan-dana-apbn>. Retrieved : 28 Mei 2017
- Kuswanto, H. (2015). Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Suku Bunga Serta Implikasinya Terhadap Permintaan Deposito Pada Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 17(29).
- Luong, Thi Mai, Russell Pieters, Harald Scheule, Eliza Wu (2016). The impact of Government Guarantees on Banks' Wholesale Funding Costs and Risk Taking : Evidence From A Natural Experiment. University of Sydney, Darlington. 31
- Masson, P. R., Bayoumi, T., & Samiei, H. (1998). International evidence on the determinants of private saving. *The World Bank Economic Review*, 12(3), 483-501.
- Mohan, R. (2006). Causal relationship between savings and economic growth in countries with different income levels. *Economics Bulletin*, 5(3), 1-12.
- Novianto, A. S., & Hadiwidjojo, D. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(4), pp-595.
- Pettinger, Tejvan (2016). Population Density. Economics Help. 11 Juni 2016 <<http://www.economicshelp.org/blog/20614/economics/population-density/>>. Retrieved : 28 Mei 2017
- Pinzon, Enrique. Fixed Effects or Random Effects : The Mundlak Approach. <http://blog.stata.com/2015/10/29/fixed-effects-or-random-effects-the-mundlak-approach/>. Retrieved : 27 Agustus 2017
- Sadiq, M., Khan, S., & Abdur, R. K. M. (2014). Bank selection criteria: a study in Malaysia. *Актуальні проблеми економіки*, (7), 429-435.
- Saini, Yvonne, Bick, Geoff, Abdulla, Loonat (2011). Consumer Awareness And Usage Of Islamic Banking Products In South Africa. *South African Journal of Economic and Management Sciences (On line version)*, vol 14. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2222-34362011000300004. Retrieved : 20 September 2017